

## Inisiatif Mahasiswa Latihan Kerja Peminatan Dalam Pengembangan Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Publikasi DPKBPPA Kabupaten Langkat

Reni Agustina Harahap<sup>1</sup>, Amanda Natasya Gunawan<sup>2\*</sup>, Ade Risma<sup>3</sup>, Munanda Andin<sup>4</sup>, Bunga Nurjannah Gea<sup>5</sup>, Riski Aditia Hanafi<sup>6</sup>, Feby Ayu Putri<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan  
Email: [amandanatasyagunawan@gmail.com](mailto:amandanatasyagunawan@gmail.com)<sup>2\*</sup>

### Abstrak

Kemajuan teknologi digital telah mendorong instansi pemerintah beradaptasi dengan pola komunikasi yang lebih cepat, luas, dan interaktif, salah satunya melalui pemanfaatan media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pembuatan, strategi pengelolaan, kendala, serta dampak awal penggunaan akun Instagram Dinas PPKB & PPA Kabupaten Langkat sebagai sarana publikasi kelembagaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dengan pegawai dinas, observasi selama kegiatan Latihan Kerja Peminatan (LKP), serta analisis dokumentasi arsip unggahan akun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inisiatif pengembangan akun Instagram oleh mahasiswa menghasilkan 25 unggahan awal yang terdiri atas konten edukasi dan publikasi kegiatan. Selama satu bulan pertama, akun mencapai sekitar 243 pengikut, menghasilkan lebih dari 17.300 tayangan, dan memperoleh interaksi tertinggi pada konten perkenalan DPPKBPPA Kabupaten Langkat. Desain konten disusun sederhana namun konsisten agar mudah dipahami oleh masyarakat. Kendala utama yang muncul adalah keterbatasan sumber daya manusia serta ketidakberlanjutan pengelolaan akun setelah masa LKP berakhir. Untuk menjaga keberlanjutan, dinas kemudian menunjuk seorang pegawai sebagai pengelola lanjutan. Pemanfaatan Instagram terbukti meningkatkan visibilitas program, memperluas jangkauan informasi publik, dan mendukung citra kelembagaan yang lebih modern dan responsif terhadap perkembangan teknologi komunikasi.

**Keywords:** Digital marketing, Instagram, Komunikasi publik, Publikasi kelembagaan

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi antara pemerintah dan Masyarakat (Kusuma, et al., 2024). Media sosial kini menjadi salah satu platform utama dalam penyebaran informasi publik karena mampu menjangkau audiens secara cepat, luas, dan interaktif (Arimiwati & Astuti, 2025). Pemerintah pusat maupun daerah semakin mendorong pemanfaatan media sosial sebagai saluran resmi untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas layanan publik.

Meskipun demikian, banyak instansi pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam komunikasi digital, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya keterampilan pengelolaan media sosial, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi (Syuhada, et al., 2024). Kondisi ini menyebabkan penyampaian informasi program kepada masyarakat belum berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Rijal, et al, 2023).

Situasi tersebut juga terjadi pada Dinas PPKB & PPA Kabupaten Langkat. Sebelum adanya kegiatan Latihan Kerja

Peminatan (LKP), dinas belum memiliki akun Instagram resmi yang dapat digunakan sebagai media publikasi. Selain itu, keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi komunikasi digital mengakibatkan informasi kegiatan dinas tidak terdokumentasi dan tidak tersampaikan secara luas kepada masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, inisiatif mahasiswa LKP untuk membuat dan mengelola akun Instagram dinas menjadi relevan untuk diteliti karena belum ada dokumentasi akademik sebelumnya mengenai pengembangan media sosial kelembagaan oleh mahasiswa LKP di lingkungan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan menggambarkan proses pembuatan akun, strategi pengelolaan, kendala yang dihadapi, serta dampak awal keberadaan media sosial sebagai sarana publikasi Dinas PPKB & PPA Kabupaten Langkat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif untuk menggambarkan proses dan pengalaman mahasiswa dalam mengembangkan akun Instagram resmi Dinas PPKB & PPA Kabupaten Langkat. Penelitian dilaksanakan di kantor Dinas selama kegiatan Latihan Kerja Peminatan (LKP) yang berlangsung selama  $\pm 1$  bulan. Informan dipilih secara purposive, terdiri dari tiga pegawai Dinas yang memahami alur publikasi program serta dua mahasiswa LKP yang terlibat langsung dalam

pembuatan dan pengelolaan akun. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam untuk menggali persepsi informan mengenai manfaat, strategi, dan kendala pengelolaan media sosial, sedangkan data sekunder berasal dari dokumentasi kegiatan, arsip unggahan Instagram, serta data insight seperti jumlah tayangan dan interaksi pada setiap postingan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Observasi diarahkan pada aktivitas pembuatan konten, frekuensi unggahan, bentuk interaksi dengan masyarakat, serta performa akun yang terlihat melalui statistik Instagram. Sementara itu, dokumentasi mencakup foto kegiatan, catatan aktivitas LKP, dan tangkapan layar insight akun. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan pemahaman menyeluruh mengenai proses pengembangan akun media sosial sebagai sarana komunikasi publik di Dinas PPKB & PPA Kabupaten Langkat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Latihan Kerja Peminatan (LKP) di Dinas PPKB & PPA Kabupaten Langkat menghasilkan berbagai bentuk kontribusi inovatif dari mahasiswa, salah satunya melalui pengembangan media sosial sebagai sarana publikasi kelembagaan. Mahasiswa peminatan

Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (PKIP) memanfaatkan peluang tersebut untuk memperkenalkan strategi komunikasi digital dalam mendukung penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat. Melalui proses observasi, inisiatif, dan kolaborasi dengan pihak dinas, terbentuklah akun Instagram resmi yang berfungsi sebagai media publikasi modern bagi instansi.

### Inisiatif Pembuatan Akun Instagram

Sebelum kegiatan LKP, Dinas PPKB & PPA Kabupaten Langkat belum memiliki media sosial resmi sehingga informasi program belum tersampaikan secara optimal. Mahasiswa LKP kemudian menginisiasi pembuatan akun Instagram sebagai sarana publikasi kelembagaan. Akun dibuat pada 26 September 2025, dimulai dari penentuan nama, desain profil, hingga pembuatan pedoman unggahan. Selama LKP, mahasiswa mengelola akun melalui penyusunan konten, desain visual, unggahan rutin, serta interaksi dengan pengguna, dengan supervisi staf dinas.

### Strategi Pengelolaan Konten

Konten dibagi menjadi tiga kategori: (1) edukasi, (2) publikasi kegiatan, dan (3) konten interaktif. Desain dibuat sederhana namun tetap mencerminkan identitas dinas melalui konsistensi warna, tipografi, dan logo. Jadwal unggahan dibuat untuk menjaga ritme publikasi. Untuk meningkatkan keterlibatan, konten disusun dengan judul menarik, pesan singkat, dan ajakan interaksi.

### Kendala Pengelolaan

Kendala utama adalah keterbatasan SDM karena sebelumnya tidak ada pegawai yang bertanggung jawab atas pengelolaan media sosial. Waktu LKP yang terbatas membuat keberlanjutan menjadi tantangan. Hambatan teknis seperti keterbatasan perangkat dan jaringan internet juga ditemukan. Setelah mahasiswa menyelesaikan LKP, dinas menunjuk satu pegawai untuk meneruskan pengelolaan akun.

### Capaian Akun Instagram

Berdasarkan Instagram Insight periode 26 September–20 Oktober 2025, akun menunjukkan perkembangan signifikan:

Tabel 1. Data platform

Aspek Keterlibatan	Jumlah
Jumlah Pengikut	243 akun
Jumlah Postingan	25 unggahan
Tayangan	17.300
Jangkauan	9.842
Likes	439
Komentar	57
Interaksi Umum	676
Engagement Rate (ER)	6,8%

Engagement rate (ER) akun dianalisis menggunakan dua pendekatan, yaitu ER berdasarkan jumlah pengikut dan ER berdasarkan jangkauan (reach). Perhitungan dilakukan pada lima unggahan terakhir dengan mempertimbangkan jumlah likes, komentar, share, dan save pada setiap unggahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ER berdasarkan pengikut berada pada kisaran 6,17% hingga 125,5% dengan nilai rata-rata 32,18%, meskipun angka

tersebut dipengaruhi oleh satu unggahan dengan interaksi yang sangat tinggi. Sementara itu, ER berdasarkan jangkauan lebih stabil, berada pada rentang 4,34% hingga 14,25%, dengan rata-rata sebesar 8,01%. Berdasarkan standar umum performa media sosial, nilai tersebut mengindikasikan bahwa tingkat keterlibatan audiens pada akun ini tergolong tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran media sosial sebagai saluran komunikasi publik di Dinas PPKB & PPA Kabupaten Langkat memberikan dampak signifikan terhadap keterjangkauan informasi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pendapat Mahliah & Setiawan (2024) yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah pola perolehan informasi masyarakat secara cepat dan luas melalui media berbasis internet (Mahliah & Setiawan, 2024). Jangkauan akun yang mencapai 9.842 pengguna dan impresi 17.300 tayangan memperkuat konsep bahwa media sosial mampu berfungsi sebagai *public information gateway* yang efektif bagi instansi pemerintah (Wulur & Mulyanti, 2023). Selain itu, interaksi masyarakat melalui komentar dan pesan langsung mencerminkan karakter media sosial sebagai ruang komunikasi dua arah yang memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif dalam isu-isu pelayanan publik (Noorikhshan, et al., 2023). Keberhasilan konten edukasi dalam menarik perhatian pengguna juga konsisten dengan hasil riset yang menekankan bahwa visual sederhana

namun informatif lebih efektif dalam menyampaikan pesan promosi kesehatan melalui platform digital (Puspasari, 2025).

Kendala yang ditemukan dalam penelitian ini, khususnya terkait keterbatasan SDM, memperlihatkan bahwa transformasi digital pada lembaga pemerintah daerah masih menghadapi hambatan struktural sebagaimana ditegaskan oleh (Hasbiah, et al., 2024) bahwa kurangnya kompetensi digital pegawai menjadi tantangan utama dalam optimalisasi komunikasi publik. Minimnya pegawai yang terampil dalam desain konten, pengelolaan insight, dan penyusunan strategi digital membuat keberlanjutan akun sangat bergantung pada inisiatif mahasiswa LKP (Dian, 2025). Kondisi ini sesuai dengan temuan sebelumnya bahwa keberhasilan media sosial lembaga pemerintah sangat ditentukan oleh keberadaan administrator yang kompeten dan konsisten dalam pengelolaan (Rahmasari, et al, 2023). Penunjukan satu pegawai setelah mahasiswa menyelesaikan LKP merupakan langkah positif, namun belum cukup untuk menjamin keberlanjutan tanpa adanya SOP, pelatihan, atau pembagian tugas yang lebih sistematis (Pratiwi, 2023). Dengan engagement rate mencapai 6,8%, akun ini memiliki potensi besar untuk menjadi kanal komunikasi resmi yang berfungsi mendukung transparansi dan peningkatan literasi publik, selaras dengan rekomendasi praktik komunikasi pemerintah modern (Goenawan & Jati, 2025).

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa keberhasilan akun dalam menjangkau masyarakat tidak hanya ditentukan oleh aktivitas unggahan, tetapi juga oleh relevansi isu yang diangkat. Konten mengenai kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta program KB terbukti lebih menarik perhatian karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Hal ini sejalan dengan model komunikasi berbasis kebutuhan (needs-based communication model) yang menjelaskan bahwa masyarakat lebih responsif terhadap informasi yang memiliki nilai utilitas langsung bagi kehidupan mereka (Anugrah, 2025). Selain itu, pola peningkatan interaksi selama periode kampanye edukasi menunjukkan bahwa algoritma media sosial bekerja optimal ketika konten diproduksi secara konsisten, sehingga instansi perlu mempertahankan ritme unggahan untuk menjaga visibilitas akun.

Dari sisi kelembagaan, keberadaan akun media sosial juga memberi peluang bagi Dinas PPKB & PPA untuk memperkuat citra institusional (institutional branding) melalui penyampaian informasi yang lebih humanis dan mudah dipahami publik. Namun, peluang ini belum sepenuhnya dimanfaatkan karena belum adanya perencanaan komunikasi digital jangka panjang. Kurangnya strategi konten yang terstruktur menyebabkan pesan-pesan yang disampaikan belum sepenuhnya menggambarkan seluruh program lintas bidang di instansi tersebut. Hal ini

mengonfirmasi pentingnya integrasi antara perencanaan program dengan strategi komunikasi digital agar media sosial dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat penyebaran informasi, tetapi juga sebagai medium advokasi publik (Destrian, 2025). Dengan penguatan kapasitas SDM dan penyusunan panduan operasional, akun ini berpotensi menjadi salah satu instrumen efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap isu-isu kependudukan, KB, serta perlindungan perempuan dan anak.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial oleh Dinas PPKB & PPA belum sepenuhnya diarahkan pada pendekatan berbasis analisis data (data-driven communication). Padahal, data insight seperti waktu aktif pengguna, jenis konten yang paling banyak berinteraksi, serta demografi audiens dapat dijadikan dasar dalam penyusunan strategi komunikasi yang lebih terarah. Minimnya pemanfaatan insight mengakibatkan proses produksi konten masih bersifat intuitif dan tidak selalu sesuai dengan preferensi audiens. Padahal, literatur menunjukkan bahwa instansi pemerintah yang mengintegrasikan analisis data dalam pengelolaan media sosial terbukti memiliki capaian komunikasi publik yang lebih efektif dan berkelanjutan (Ardiansyah, 2024). Dengan demikian, peningkatan kapasitas pegawai dalam membaca dan menerjemahkan insight menjadi strategi adalah kebutuhan

mendesak untuk mempertahankan efektivitas kanal digital ini.

Di sisi lain, interaksi masyarakat melalui fitur direct message (DM) yang cenderung meningkat selama masa pengelolaan oleh mahasiswa LKP memperlihatkan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai kanal aduan dan konsultasi awal terkait isu keluarga berencana maupun perlindungan perempuan dan anak. Namun, absennya mekanisme respon cepat (*fast-response mechanism*) membuat sebagian pesan tidak segera ditindaklanjuti. Kondisi ini penting diperhatikan karena keterlambatan respon berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Beberapa penelitian sebelumnya menegaskan bahwa responsivitas merupakan indikator utama keberhasilan komunikasi publik digital, khususnya bagi lembaga yang menangani isu layanan sosial (Kustarto, et al, 2025). Artinya, media sosial bukan hanya alat penyebar informasi, tetapi juga sarana untuk membangun kepercayaan melalui layanan komunikasi dua arah yang aktif.

Selanjutnya, hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa belum adanya integrasi konten antar-bidang (Dalduk, KB, PPA, KHP) menyebabkan penyampaian informasi tampak terfokus pada tema tertentu dan belum mencerminkan keseluruhan program yang dijalankan Dinas. Padahal, integrasi lintas bidang sangat penting untuk membangun pemahaman publik yang komprehensif mengenai cakupan tugas dan tanggung

jawab instansi. Kurangnya integrasi ini dapat mengurangi efektivitas advokasi kebijakan yang seharusnya menjadi salah satu fungsi utama komunikasi publik pemerintah. Penelitian oleh Dimas & Fahlevi (2024) menegaskan bahwa komunikasi pemerintah yang terfragmentasi berdampak pada rendahnya awareness masyarakat terhadap program prioritas (Dimas & Fahlevi, 2024). Karena itu, penyusunan kalender konten lintas bidang (*integrated content calendar*) menjadi langkah strategis yang dapat meningkatkan keteraturan, keberagaman konten, dan kesinambungan pesan.

Dari perspektif penguatan kelembagaan, temuan penelitian ini juga mengungkap bahwa keberhasilan komunikasi digital sangat dipengaruhi oleh dukungan pimpinan. Selama pengelolaan akun, peran pimpinan instansi dalam memberikan arahan, supervisi, maupun dukungan formal terhadap aktivitas komunikasi digital masih terbatas. Padahal, literatur menunjukkan bahwa dukungan kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan transformasi digital, karena berpengaruh pada alokasi sumber daya, penetapan kebijakan internal, hingga prioritas program (Elfrida, et al, 2024). Tanpa komitmen struktural dari pimpinan, keberlanjutan akun media sosial akan sulit terjamin meskipun sudah ada tenaga pengelola.

Akhirnya, potensi akun dalam memperkuat hubungan instansi dengan masyarakat juga dapat ditingkatkan melalui

penerapan strategi komunikasi partisipatif, seperti mengajak masyarakat mengirim pertanyaan, membuat ruang diskusi daring, atau kampanye kolaboratif dengan kader/penyuluh lapangan. Pendekatan partisipatif ini terbukti memperluas keterlibatan publik, meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program, dan memperkuat posisi instansi sebagai mitra informasi terpercaya (Sumarto, 2025). Dengan engagement rate yang sudah berada di kategori baik, strategi ini dapat semakin mengoptimalkan jangkauan sekaligus kualitas interaksi sehingga media sosial benar-benar menjadi ruang komunikasi publik yang hidup dan relevan..

## KESIMPULAN

Hasil pelaksanaan LKP menunjukkan bahwa inisiatif mahasiswa dalam membuat dan mengelola akun Instagram Dinas PPKB & PPA Kabupaten Langkat telah meningkatkan publikasi program serta memperluas akses informasi bagi masyarakat. Kehadiran akun ini membantu membangun citra dinas yang lebih modern, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Meskipun demikian, pengelolaan media sosial masih terkendala oleh keterbatasan SDM dan belum adanya struktur kerja yang menjamin keberlanjutan akun setelah LKP berakhir. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola agar media sosial dinas dapat berfungsi secara konsisten dan profesional.

Sebagai saran operasional, dinas perlu menetapkan penanggung jawab khusus yang bertugas mengelola akun media sosial setiap hari. Instansi juga perlu menyusun SOP unggahan, mencakup alur persetujuan konten, standar desain, dan frekuensi publikasi. Selain itu, pegawai perlu mengikuti pelatihan desain grafis, copywriting, dan komunikasi digital untuk meningkatkan kualitas konten. Evaluasi bulanan terhadap insight Instagram meliputi jangkauan, tayangan, dan interaksi perlu dilakukan untuk menilai efektivitas publikasi dan menentukan strategi peningkatan. Dengan langkah-langkah tersebut, akun Instagram dinas diharapkan dapat menjadi media komunikasi publik yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dinas PPKB & PPA Kabupaten Langkat yang telah memberikan izin, fasilitas, serta dukungan selama proses pelaksanaan kegiatan dan penyusunan artikel ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing atas arahan dan masukan yang konstruktif. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi instansi terkait dan pengembangan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR PUSTAKA

Anugrah, A., Purwanti, S., Boer, K. M., & Dwivayani, K. D. (2025). Kepercayaan Publik dan Kegagalan Komunikasi dalam Layanan Utilitas: Bukti dari Penyedia Air Lokal di

- Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi Pattimura*, 4(1), 129-143.
- Ardiansyah, R. D. (2024). *Strategi Komunikasi Humas Setda Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Melalui Penggunaan Media Sosial Instagram@ Humas. Jateng Dalam Publikasi Kinerja Pimpinan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Arimiawati, I., & Astuti, V. F. (2025). Pemanfaatan media sosial Instagram @djplkemenhub151 sebagai sarana penyebaran informasi publik. *Jurnal Kajian Teori dan Praktik Pendidikan*, 6(2).
- Destrian, O., Nuryanto, Y., & Sudarna, S. (2025). Dinamika Komunikasi Digital Dalam Advokasi Kesehatan Lingkungan: Studi Kasus Serlok Bantaran Cikapundung. *Jurnal Common*, 9(1), 43-56.
- Dewi, D. P. (2025). Peran magang dalam optimalisasi pengelolaan website dan media sosial BKPSDM Kabupaten Kebumen sebagai media informasi publik.
- Dimas, M., & Fahlevvi, M. R. (2024). Pengentasan Digital Divide dalam Penerapan E-Government di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 6(2), 194-215.
- Elfrida, E., Nurhayati, P., & Saptono, I. T. (2024). Faktor-faktor yang Memengaruhi Implementasi Transformasi Digital Pada Bank XYZ. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)*, 10(1), 312-312.
- Goenawan, W. J., & Jati, R. P. (2025). Penerapan Media Sosial Untuk Transparansi Publik: Studi Optimalisasi Instagram oleh LLDIKTI Wilayah III. *Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955/ p-ISSN 2809-0543*, 6(2), 317-328.
- Hasbiah, H., Prasodjo, T., Saifuloh, N. I., Daud, A., & Awaluddin, M. (2024). Optimalisasi manajemen sumber daya manusia dalam administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. *Journal of Human and Education (JAHE)*, 4(6), 46–53.
- Kustarto, I., Mustofah, A., & Pramudiana, I. D. (2025). Responsivitas Pelayanan Publik oleh Kepolisian Resort Mojokerto dalam Menangani Pengaduan Masyarakat. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(3), 195-214.
- Kusuma, D. A., Yendra, M., Bakhtiar, R., Takdir, M., & Handrina, E. (2024). Pengaruh media sosial terhadap pola komunikasi pemerintah dan masyarakat dalam era digital. *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 5(1), 23–32.
- Mahliah, I., & Setiawan, R. (2024). Adanya perubahan teknologi informasi dalam mengubah pola belajar siswa di era digital. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(2), 106–117.
- Noorikhsan, F. F., Ramdhani, H., Sirait, B. C., & Khoerunisa, N. (2023). Dinamika internet, media sosial, dan politik di era kontemporer: Tinjauan relasi negara–masyarakat. *Journal of Political Issues*, 5(1), 95–109.
- Prayogo, M. D., Rahmasari, R. F., & Pristiana, A. F. (2023). Manajemen media informasi dalam birokrasi: Strategi peningkatan kualitas konten sosial media Instagram sebagai publikasi layanan administrasi Kecamatan Krembung Sidoarjo. *RELASI: Jurnal Penelitian Komunikasi*, 3(1), 1–9.
- Puspasari, H. W., KM, S., & KM, M. (2025). Evaluasi promosi kesehatan. *Pengembangan Media Promosi Kesehatan*, 219.

- Rijal, S., Azis, A. A., Chusumastuti, D., Susanto, E., & Nirawana, I. W. S. (2023). Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Bagi Masyarakat. *Easta Journal of Innovative Community Services*, 1(03), 156-170.
- Sumarto, H. S. (2025). *Inovasi, partisipasi dan good governance: 20 prakarsa inovatif dan partisipatif di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Syuhada, F. F., Julian, C., Iriani, A., Chairani, A. L., & Austin, T. (2024). Transformasi e-government melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 12(2), 7–14.
- Wulur, F. C., & Mulyanti, D. (2023). Analisis pengaruh pemanfaatan media sosial dalam penyebaran layanan informasi publik di pemerintah. *MANABIS: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 37–45.